

LAPORAN TATA KELOLA 2023

 **bsam call 0272-2952727**

 **081326909700**

 **banksyariahalmabrur@gmail.com**

 **www.banksyariahalmabrur.co.id**

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
A. Penerapan Tata Kelola	1
B. Prinsip Tata kelola	1
C. Landasan dan Kebijakan Tata kelola.....	2
D. Struktur Tata Kelola	2
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	4
A. Cakupan Tata Kelola	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	4
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	4
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	5
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola.....	5
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	7
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi.....	7
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi	8
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain	8
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris.....	8
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.....	8

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	9
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	9
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	9
2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris	9
L. Frekuensi Rapat DPS	10
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	10
2. Kehadiran Anggota DPS.....	10
M. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	10
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh BPRS.....	10
O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	10
P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	10
BAB III PENUTUP.....	12

BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Penerapan Tata Kelola

Proses transformasi yang dilakukan PT BPRS Al Maburr Klaten (BSAM) pada tahun 2020-2022 yang diawali dengan pra-transformasi hingga transformasi fase 2, membawa makna dan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan BSAM. Dimana proses transformasi dilakukan diseluruh lini perusahaan, mulai dari redesain Logo, Visi dan Misi serta pembuatan *core values*. Perkembangan dan pertumbuhan BSAM tidak lepas dari sebuah proses tata kelola yang baik dan terus beradaptasi terhadap kondisi dan ketentuan regulasi untuk selalu dilakukan perbaikan.

BSAM percaya bahwa kualitas penerapan tata kelola yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem dan budaya yang kuat dalam mewujudkan keberhasilan dan keberlanjutan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. BSAM secara terus menerus konsisten untuk melakukan perbaikan penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) pada sistem dan proses bisnis untuk mewujudkan bank yang sehat.

BSAM memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik agar tercapai keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Komitmen tersebut dimulai dari kelengkapan struktur organisasi, nilai-nilai kerja dan pengkinian kebijakan sebagai pedoman insan BSAM dalam menjalankan operasional dan bisnis perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik tidak lepas dari prinsip-prinsip tata kelola, dimana prinsip tersebut secara teori dan praktek telah teruji dan membuktikan bahwa keberhasilan perusahaan sangat tergantung dari penerapan tata kelolanya.

B. Prinsip Tata kelola

Sebagai bank syariah, BSAM memiliki tantangan yang besar dalam menerapkan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Dimana hal ini menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Pada penerapannya BSAM terus berupaya untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada POJK No.24/POJK.03/2018 dan SE OJK No.9/SEOJK.03/2022 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tidak lepas dari prinsip tata kelola yang meliputi;

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

4. Profesional (*Professional*)
5. Kewajaran (*Fairness*)

Pelaksanaan tata kelola yang baik dan konsisten memberikan manfaat bagi BSAM, diantaranya adalah:

1. Melindungi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*
2. Mengarahkan BSAM menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan
3. Sebagai arah dalam penerapan visi misi perusahaan
4. Menghindarkan berbagai potensi risiko bank, tidak terkecuali risiko kepatuhan
5. Meningkatkan kepatuhan pada prinsip syariah serta nilai dan etika yang berlaku pada industri perbankan syariah

C. Landasan dan Kebijakan Tata kelola

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, BSAM mengacu pada Alqur'an dan Hadist, Fatwa DSN-MUI, ketentuan regulator dan ketentuan internal bank yang diukur dari risiko perusahaan. Adapun beberapa ketentuan regulator sebagai pedoman dalam penerapan tata kelola BSAM antara lain;

1. Undang-undang Perseroan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26 /POJK.03/2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 24 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan perubahan terakhir (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2022.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 11 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

D. Struktur Tata kelola

BSAM memiliki struktur tata kelola perusahaan dalam mengawal operasional dan bisnis bank memenuhi peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Adapun struktur tata kelola yang berlaku di BSAM adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan organ tertinggi BSAM dalam melakukan keputusan aksi perseroan termasuk dalam memutuskan paket remunerasi pengurus BSAM.

2. Dewan Komisaris

Wakil dari *shareholders* adalah Dewan Komisaris, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas berjalannya operasional bank yang baik, melalui mekanisme rapat dewan komisaris.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS merupakan organ khusus yang ada pada bank syariah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan operasional dan bisnis bank tidak melanggar pada prinsip syariah.

4. Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundangan yang berlaku, dan prinsip tata kelola dalam menjalankan perusahaan untuk memastikan terpenuhi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

BAB II

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Cakupan Tata Kelola

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BSAM telah dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	M Hanny Naufal	Direktur Utama	Menyusun, mengontrol dan mengendalikan Rencana Bisnis Bank (RBB), memastikan pelayanan berkualitas, memastikan tercapainya target bisnis, mendorong, membina, dan mengevaluasi kinerja bawahan, serta wajib menjalankan tata kelola bank yang baik.
2	Rosid Wahyu Nugroho	Direktur YMKF	Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BSAM telah memenuhi seluruh ketentuan internal seperti yang instruksikan regulator dan prinsip syariah serta memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BSAM tidak menyimpang dari ketentuan internal, regulator dan prinsip syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Syamsul Ma'arif	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan kepada Direksi, memberikan advise atas operasional dan bisnis bank untuk mencapai target RBB dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan.
2	Ruswanto	Komisaris	

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Iskak Sulistiya	Ketua DPS	Melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah pada operasional dan bisnis bank, serta mengeluarkan opini terhadap produk dan aktivitas bank.
2	Muslich Wahid Mahdy	Anggota DPS	

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Bahwa atas skala operasional dan bisnis dengan merujuk pada Ketentuan POJK khususnya tata kelola, BSAM belum membentuk komite-komite untuk membantu tugas Direksi.

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan BSAM pada tahun 2023 dengan data sebagai berikut:

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.50	0.86	0.18	1.54	0,31	Struktur dan Infrastruktur Direksi telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.56	0.60	0.10	1.26	0,19	Struktur dan Infrastruktur Dekom telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	0.70	0.74	0.14	1.58	0,16	Struktur dan Infrastruktur DPS telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	Struktur dan Infrastruktur BSAM tidak memiliki Komite audit dan komite pemantau risiko dikarenakan modal inti BPRS AL Mabrur <Rp80M.
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.00	0.60	0.25	1.85	0,14	Struktur dan Infrastruktur pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS belum sepenuhnya terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga hasil belum maksimal dalam Penerapan Tata kelola yang baik
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	0.50	0.40	0.20	1.10	0,08	Tidak ada benturan kepentingan di BPRS AL Mabrur Klaten
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	0.50	0.87	0.17	1.54	0,12	Struktur dan Infrastruktur fungsi kepatuhan telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	1.00	1.20	0.15	2.35	0,18	Struktur dan Infrastruktur fungsi audit intern telah terpenuhi, Proses Penerapan belum sepenuhnya terpenuhi dan belum sepenuhnya menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0,03	Struktur dan Infrastruktur fungsi audit eksternal telah terpenuhi, Proses Penerapan telah terpenuhi dan diharapkan menghasilkan Penerapan Tata kelola yang baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	1.17	0.97	0.10	2.24	0,17	Struktur dan Infrastruktur fungsi manrisk telah terpenuhi akan tetapi bank belum menetapkan limit resiko sehingga perlu adanya pembaharuan kebijakan terkait limit resiko dimasing-masing resiko.
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	0.50	0.40	0.10	1.00	0,05	Struktur dan Infrastruktur , Proses Penerapan batas maksimum penyaluran dana telah terpenuhi oleh Bank.
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	0.50	0.60	0.10	1.20	0,06	Struktur dan Infrastruktur fungsi Rencana bisnis bank telah terpenuhi, akan tetapi masih kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dekom terkait pelaksanaan rencana bisnis bank
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1.50	0.40	0.10	2.00	0,100	Struktur dan Infrastruktur bank terkait transparansi kondisi keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya tepenuhi, Proses Penerapan sudah terpenuhi.
Nilai						1,6	
Peringkat						1	

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Kode Komponen	Periode Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset	Bobot Faktor	Nilai Komposit	Peringkat Komposit
130100000000	20231231	Jl. Kopral Sayom No.16, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 57438	0272-2952727	20267382678	229126114781	8	1,6	1

Terlihat dari tabel hasil penilaian sendiri diatas, menunjukkan bahwa BSAM memiliki peringkat komposit 1 (sangat baik) dengan nilai komposit sebesar 1,59. Penilaian tersebut berdasarkan penilaian di 11 faktor diantaranya :

- 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- 5 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS
- 6 Penanganan Benturan Kepentingan
- 7 a. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 7 b. Penerapan Fungsi Audit Intern
- 7 c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 8 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 9 Batas Maksimum Penyaluran Dana
- 10 Rencana Bisnis BPRS
- 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS Al Mabrur Klaten		Perusahaan Lain	
		Nominal	Porsi Kepemilikan	Nominal	Porsi kepemilikan
1	M Hanny Naufal	Rp10.000,-	0,0001%	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rosid Wahyu Nugroho	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	M Hanny Naufal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	Rosid Wahyu Nugroho	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga			
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	M Hanny Naufal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rosid Wahyu Nugroho	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS Al Mabrur Klaten		Perusahaan Lain	
		Nominal	Porsi Kepemilikan	Nominal	Porsi kepemilikan
1	Syamsul Ma'arif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ruswanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Syamsul Ma'arif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ruswanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota DPS	Pemegang Saham
1	Syamsul Ma'arif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ruswanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS	Jabatan
		Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	
1	Syamsul Ma'arif	PT BPR Antar Rumeksa Arta	Komisaris
		PT BPR Bhakti Riyadi Wedi	Komisaris Utama
2	Ruswanto	KSPPS BMT Ahmad Dahlan	Manager

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No	Nama Anggota DPS	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Iskak Sulistiya	KSPPS BMT Bina Umat	Ketua DPS
2	Muslich Wachid Mahdy	PT BPRS Dharma Kuwera	Anggota DPS

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

BSAM telah membuat kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diputuskan melalui RUPS. Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mendapatkan remunerasi berupa gaji, tunjangan dan tantiem dan remunerasi lainnya.

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.26
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.25
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.20
Rasio gaji Pegawai tertinggi terhadap gaji Pegawai terendah	2.78
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.25
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	0.25

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	14 Maret 2023	2	Evaluasi kinerja BSAM TW I tahun 2023
2	19 Juni 2023	2	Pembahasan likuiditas Bank
3	11 Agustus 2023	2	Evaluasi atas RBB smt 1 tahun 2023 dan mendengar strategi bisnis dari Direksi
4	22 September 2023	2	Capita selecta
5	10 November 2023	2	Evaluasi ABA bank
6	12 Desember 2023	2	Mendengarkan dan memberikan arahan kepada Direksi atas RBB 2024

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Syamsul Ma'arif	6	-	100%
2	Ruswanto	6	-	100%

L. Frekuensi Rapat DPS**1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	15 Maret 2023	2	Pembahasan implementasi akad Murabahah
2	5 Juni 2023	2	Perlunya Direksi dan jajaran membaca fatwa DSN-MUI dalam menjalankan operasional bank
3	31 Agustus 2023	2	Rapat finalisasi laporan pengawasan smt 1
4	15 November 2023	2	Rapat finalisasi Opini SDB

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Iskak Sulistiya	4	-	100%
2	Muslich Wachid Mahdy	4	-	100%

M. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh BPRS

Selama tahun 2023, BSAM tidak menghadapi persoalan Hukum baik Perdata maupun Pidana.

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, BSAM tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2023, BSAM tidak melakukan transaksi penyaluran dana untuk kegiatan politik. Namun, sepanjang tahun 2023 BSAM telah menyalurkan dana untuk sosial dengan tabel sebagai berikut:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	02 Agustus 2023	Mitra Umat	Pemberian modal kerja kepada para penerima manfaat baik berupa gerobak usaha atau modal tunai.	22 Penerima Manfaat (Masyarakat sekitar kantor)	43.755.697
2	Senin, 26 Januari 2023. Rabu, 22 Februari 2023. Rabu 15 Maret 2023. Jumat, 14 April 2023. Senin, 29 Mei 2023. Selasa, 27 Juni 2023. Jumat 28 Juli 2023. Senin 28 Agustus 2023. Kamis 28 September 2023. Jumat 27 Oktober 2023. Rabu 22 November 2023. Rabu 27 Desember 2023	Didik Umat	Pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu. Dari jenjang pendidikan TK sampai dengan Perguruan Tinggi	36 Penerima Manfaat masyarakat dhuafa Klaten	26.253.418
3	Senin, 26 Januari 2023. Rabu, 22 Februari 2023. Rabu 15 Maret 2023. Jumat, 14 April 2023. Senin, 29 Mei 2023. Selasa, 27 Juni 2023. Jumat 28 Juli 2023. Senin 28 Agustus 2023. Kamis 28 September 2023. Jumat 27 Oktober 2023. Rabu 22 November 2023. Rabu 27 Desember 2023	Simpat Umat	Bantuan sosial kepada masyarakat luas yang sedang ditimpa musibah, sakit. Dengan tujuan untuk sedikit meringankan beban penerima manfaat	145 Penerima Manfaat dhuafa Klaten	17.502.278

BAB III PENUTUP

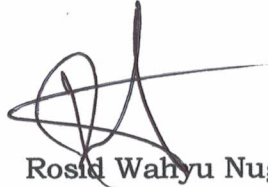
Laporan penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan bentuk transparansi/keterbukaan atas pengelolaan perusahaan kepada *stakeholders* agar keberlanjutan perusahaan mampu terus dijaga dengan baik. Pelaksanaan tata kelola tidak lepas dari kerja sama seluruh insan BSAM baik pengurus maupun karyawan dalam melaksanakan setiap prosedur dan budaya kerja. BSAM berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dalam proses operasional maupun bisnis untuk dapat menjadi bank yang sehat dan *resilience* dimasa yang akan datang.

Klaten, 8 Januari 2024

PT BPRS AL MABRUR KLATEN
KANTOR PUSAT



M Hanny Naufal
Direktur Utama



Rosid Wahyu Nugroho
Direktur